SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Senin, 11 April 2016 06:00

Bupati MBD "Semprot" Kementerian

SARANA kesehatan dan fasilitas perhubungan minim. Warganya di Pulau Lirang sakit selalu berobat ke Dili, Timor Leste, karena lebih dekat daripada harus ke daerah – daerah di MBD. Warga kemudian dijemput otoritas negara itu ke Kota Dili untuk berobat

Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas Orno melampiaskan kekecewaannya kepada kementrian Perhubungan RI saat digelarnya Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrembang) provinsi Maluku yang berlangsung diatas Kapal Dorolonda, Sabtu pekan lalu.

Orno kesal dan menyemprot tim dari Kementrian Perhubungan yang ikut dalam Musrembang tersebut lantaran Kemenhub dinilai kurang memberikan perhatian terhadap masalah transportasi dan perhubungan di wilayah itu. Padahal kabupaten yang dipimpinnya itu berada di wilayah terluar dan terdepan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan juga Australia. Protes itu dilayangkan bupati kepada pejabat Kemenhub RI, Antonius Tonny Budiono dan sejumlah pejabat lainnya.

"Kapal Pelni masuk Saumlaki. Kapal hanya lewat wilayah MBD, kami hanya bisa lihat kapal itu lewat. Padahal kami sangat membutuhkan kapal itu agar ditumpangi. Ini republik bagimana, saya minta Kemenhub memperhatikan masalah ini agar kapal pelni melayari juga MBD,"ujarnya Sabtu pekan lalu.

Dia mengaku kapal milik PT. Pelni selama ini hanya melintasi wilayah Maluku Tenggara Barat (MTB) namun tidak menyinggahi MBD. Padahal warganya sangat membutuhkan kapal tersebut. Orno sendiri mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah tersebut kepada kementrian Perhubungan namun tidak pernah digubris.

"Kami sudah bosan menyurati Kemenhub dan Pemprov Maluku, karena keinginan kami tidak kunjung direalisasi," katanya.

Menurut bupati karena minimnya sarana kesehatan dan fasilitas perhubungan, warganya di Pulau Lirang yang sakit selalu berobat ke Dili, Timor Leste, karena lebih dekat daripada harus ke daerah – daerah di MBD. Warga menyebrang ke Pulau Atauro, Timor Leste kemudian dijemput otoritas negara itu ke Kota Dili untuk berobat.

"Setelah berobat diantar lagi ke Pulau Atauro, untuk kembali ke Lirang. Saya tidak bisa salahkan warga, masa orang sakit parah dibawa ke daerah yang sulit transportasi dan minim fasilitasnya, bisa- bisa mati di jalan. Karena itu pemerintah harus bangun fasilitas baik kesehatan maupun perhubungan di wilayah kami," katanya.

Belum lagi, soal peneragan. Sejumlah pulau terluar di MBD belum dialiri listrik,sementara sejumlah pulau negara tetangga mereka terang di malam hari. Kondisi itu menurut bupati sangat berbahaya dan mengancam nasionalisme warganya.

Bupati juga menyatakan sejak 2012 silam, ia sering mendatangi Kemenhub di Jakarta, meminta kapal baik perintis maupun kapal pelni agar melayari wilayahnya. Namun permintaannya tidak pernah ditanggapi pihak Kementrian.

Dia juga mengeluhkan pembangunan fasilitas Bandara Jos Orno Insula di Tiakur, Pulau Moa, Ibukota MBD yang hingga kini belum rampung padahal sudah dilakukan sejak 2012 lalu. Bandara itu kata dia belum memiliki fasilitas keselamatan seperti mobil pemadaman kebakaran. Sedangkan pesawat yang terbang ke daerah itu hanya pesawat ukuran kecil milik maskapai Avia Star.

"Kami minta agar panjang landasan bandara ditambah dan pengadaan mobil pemadam kebakaran sehingga bandara bisa didarati pesawat jenis ATR yang lebih besar,"kata Orno.

Gubernur Maluku Said Assagaff juga menyatakan, selama ini kapal yang diberikan Kemenhub ke MBD dan MTB adalah kapal yang tidak layak. Yang diberikan kapal ukuran kecil dan kapal bekas. Padahal wilayah tersebut bergelombang tinggi dan rentan terhadap kecelakaan laut.

Menurut Gubernur, tahun ini Maluku mendapat tiga kapal ukuran besar. Satu kapal akan melayari wilayah MBD. Antonius sendiri tidak bisa berbuat apa-apa saat protes Bupati MBD ini. "Saya mohon maaf, nanti saya sampaikan ke pimpinan agar bisa direalisasi,"katanya. **(MG1)**

SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Selasa, 26 April 2016 06:00

Bakal Ada Dua Atau Tiga Tersangka Baru

PENGEMBANGAN kasus suap proyek jalan di Pulau Seram, Maluku terus berlanjut. Sejumlah pihak akan diperiksa KPK di Mako Brimob Polda Maluku. Mereka memastikan bakal ada dua hingga tiga tersangka baru di kasus ini. Siapa lagi?

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pengeledahan di dua lokasi di Kota Ambon dalam kaitannya dengan pengembangan kasus suap proyek jalan di Pulau Seram, Maluku yang menyeret sejumlah politisi senayan di Jakarta.

Dalam pengeledahan itu, sejumlah dokumen penting berhasil disita KPK dari Kantor Balai Jalan dan Jembatan Nasional (BPJJN) Wilayah IX Maluku-Maluku Utara dan kediaman Amran Mustari.

Kantor BPJJN Wilayah IX Maluku-Maluku Utara di Jalan M. Putuhena kawasan Wailela Kecamatan Teluk Ambon, Senin (25/4) ini, sebelumnya juga digeledah, pada Februari 2016 oleh komisi antirasuah ini. Saat itu, KPK juga melakukan aksi yang sama di kantor dan kediaman Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

Penggeledahan yang dipimpin penyidik KPK, AKBP Hendri Cristian ini terkait kasus suap pengamanan proyek di Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikelola BPPJN Maluku-Malut tahun anggaran 2016.

Delapan penyidik mendatangi Kantor BPJJN sekitar pukul 09.30 Wit, dengan menggunakan tiga mobil Kijang Inova. Setibanya mereka langsung masuk ke dalam kantor dan melakukan penggeledahan dikawal aparat Brimob Polda Maluku bersenjata lengkap. Awalnya, kedatangan tim penyidik KPK untuk melakukan penggeladahan sempat membuat kaget para pegawai BPJJN Maluku-Malut. Meski begitu aktivitas kantor berjalan normal.

Sejumlah ruangan digeledah penyidik KPK mulai dari ruang kerja Amran Mustari yang ada di kantai II kantor BPJJN Maluku-Malut, hingga tiga ruang kerja satuan kerja (Satker) BPJJN wilayah I dan II Maluku yang berada di lantai I.

Selama penggeledahan awak media dilarang meliput oleh Satpam di kantor tersebut. Amran Mustari tidak terlihat selama KPK menggeledah kantornya. Setelah sekiitar sembilan jam melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK meninggalkan kantor tersebut. Tiga koper berisi dokumen dan satu map merah disita dalam penggeledahan itu.

Usai penggeledahan di kantor BPJJN, penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di kediaman Amran Mustari yang berada di perumahan elite, Citra Land di kawasan Lateri, Ambon.

“Ada dokumen yang kita sita, DD, EE dan OE. (Setelah menggeledah kantor BPJJN), kita mau ke rumahnya Pak Amran Mustari,” kata AKBP Hendri Christian usai penggeledahan di BPJJN, tadi malam.

Untuk pengembangan kasus, KPK hari ini akan memeriksa sejumlah pihak. “Mulai besok (hari ini) ada pemeriksaan selanjutnya di Mako Brimob Polda Maluku,” kata perwira Polri asal Kabuupaten Maluku Barat Daya ini .

Usai penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Ambon, Christian memastikan KPK dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. “Dalam waktu dekat, dua sampai tiga orang akan ditetapkan jadi tersangka,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan Pulau Seram di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, KPK sudah menetapkan lima orang menjadi tersangka. Dua diantaranya merupakan anggota Komisi V DPR, yaitu Budi dan Damayanti dari Fraksi PDIP.

Damayanti diduga menerima SG$33 ribu pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sementara Budi diduga telah menerima uang sekitar SG$305 ribu.

Ketiga tersangka lainnya yakni Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir serta dua rekan Damayanti, Dessy A. Edwin serta Julia Prasetyarini.

Dalam perkembangannya, baru Abdul Khoir yang telah disidangkan. Dia didakwa memberi suap kepada pejabat di Kementerian PUPR dan sejumlah anggota Komisi V DPR RI.

Total uang suap yang diberikan Abdul sebesar Rp 21,38 miliar, SG$1,67 juta, dan US$72,7 ribu. Suap diberikan oleh Abdul bersama-sama dengan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng dan seorang rekannya yang juga kontraktor asal Maluku.

Sebelum penggeledahan di dua Kota Ambon, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan penggeledahan kali ini dilakukan di BPJJN IX Maluku-Malut. “Pagi ini (kemarin) penyidik KPK melanjutkan penyidikan untuk tersangka BS dengan menggeledah

BPJN IX di Jalan M. Putuhena, Wailela, Ambon," ujar Priharsa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/4) pagi.

Priharsa belum bisa memastikan dokumen dan alat bukti apa yang berhasil diperoleh dalam penggeledahan tersebut. Ia mengaku, penggeledahan untuk mendalami keterlibatan politisi Golkar Budi Supriyanto dalam suap tersebut. Selanjutnya ia juga menampik KPK telah menetapkan tersangka baru dalam suap tersebut. "Sampai saat ini penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut," katanya. **(KTR/CNN)**

SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Rabu, 27 April 2016 20:01

Amran dan Andi Resmi Tersangka

HAMPIR 12 jam lima staf BPJJN Maluku dan Maluku Utara diperiksa penyidik KPK. Pemeriksaan saksi masih dilanjutkan hari ini. Dua orang resmi ditetapkan menjadi tersangka. Siapa mereka?

KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan tersangka baru kasus suap proyek pembangunan jalan Pulau Seram. Dua tersangka itu adalah Kepala Jalan Jembatan Nasional (BPJJN) Maluku-Maluku Utara Amran Mustari dan anggota Komisi V DPR RI, Andi Tofan Tiro.

“Sudah ada tersangka baru, berinsial AM dan ATT. Sudah ditetapkan (tersangka) sejak 20 April lalu,” ungkap penyidik KPK, Hendri Christian yang dihubungi Kabar Timur, tadi malam.

Christian merupakan Ketua Tim Satuan Tugas Khusus (Satgas) yang ditugaskan komisi antirasuah ini melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan pemeriksaan saksi-saksi di Kota Ambon terkait kasus suap proyek pembangunan jalan di Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat.

Dengan bertambahnya tersangka, untuk sementara, total tersangka berjumlah tujuh orang. Sebelumnya KPK sudah menetapkan lima orang tersangka, dua diantaranya merupakan anggota Komisi V DPR, yaitu Damayanti dari Fraksi PDIP dan Budi Supriyanto, politisi Golkar. Tersangka lainnya yakni, Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir serta dua rekan Damayanti, Dessy A. Edwin dan Julia Prasetyarini.

Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng alias Frangky Tanaya, yang telah dicegah KPK ke luar negeri, statusnya masih sebagai saksi. Demikian juga Michael Wattimena, anggota Komisi V DPR RI. “Sementara (tersangka baru) masih dua orang. Selama ini kita masih periksa mereka (Aseng dan Wattimena) masih sebagai saksi,” kata Christian.

DIPERIKSA 12 JAM

Sehari pasca pengeledahan di Kantor BPJJN Maluku-Maluku Utara dan rumah Amran Mustari, KPK kemarin memeriksa sejumlah saksi.

Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Polda Maluku di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon,. Pemeriksaan berlangsung tertutup sehingga menyulitkan wartawan mengabadikan gambar.

Pemeriksaan saksi berlangsung hampir 12 jam, mulai pukul 10.00 WIT hingga mendekati pukul 22.00 WIT.

Pantuan Kabar Timur, satu jam sebelum pemeriksaan, dua mobil Inova yang ditumpangi 8 penyidik KPK tiba di Mako Brimob Polda Maluku. Tak lama sejumlah saksi, mulai terlihat berdatangan ke Mako Brimob dengan menggunakan kendaraan roda empat. Pintu kaca mobil yang tertutup rapat, sehingga tidak diketahui pasti, siapa-siapa yang diperiksa.

Sejumlah mobil plat merah masuk keluar dari Mako Brimob, sejak siang hingga malam hari. Belakangan diketahui mobil dinas itu milik pejabat BPJJN Maluku-Malut.

Siapa saksi-saksi yang diperiksa, Hendri Christian mengatakan, enam orang diperiksa sebagai saksi oleh tim Satgas KPK. Lima diantaranya pejabat BPJJN Maluku-Maluku Utara. Empat diantaranya, Iqbal Tamher, Sutardi, Zadrak alias Cada Ayal, dan Okto. Satu saksi lainnya adalah Lendi Tanaya.

Soal materi pemeriksaan, perwira Polri asal Kabupaten Maluku Barat Daya ini enggan menjelaskan. Begitu juga terkait pemeriksaan terhadap Lendi Tanaya dalam kasus suap ini. “Lendi merupakan saudara Aseng,” kata Christian.

Tidak terlihat Kepala BPJJN Maluku-Malut, Amran Mustari dalam “rombongan” saksi yang diperiksa penyidik KPK. “Dia (Amran) tidak diperiksa, mungkin di Ternate,” ujar dia.

Christian mengatakan, penggeledahan dan pemeriksaan saksi-saksi di Kota Ambon untuk mendalami keterlibatan Budi Supriyanto dalam kasus suap tersebut.

Di hari yang sama, KPK juga mengirimkan tim Satgas berjumlah 8 orang ke Kota Ternate, Maluku Utara. Di Ternate KPK menggeledah kantor perwakilan BPJJN Maluku-Malut, Senin (25/4) dan dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi, kemarin.

Christian juga tidak dapat memastikan dari sederet saksi yang diperiksa di Ternate, satu diantaranya Amran Mustari. “Agenda tim Satgas sama (dengan di Ambon), kemarin penggeledahan dan hari ini (Selasa), pemeriksaan saksi. Saya tidak tahu apa dia (Amran) diperiksa di Ternate,” ujar Christian.

Hari ini, KPK masih melanjutkan pemeriksaan saksi. “Siapa-siapa (saksi yang akan diperiksa) saya tidak hapal karena banyak,” imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, kasus ini terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Damayanti. Dia diduga menerima SG$33 ribu pada saat OTT dari Abdul Khoir untuk pengamanan proyek jalan di Pulau Seram. Sementara Budi diduga telah menerima uang sekitar SG$305 ribu.

Total uang suap yang diberikan Abdul sebesar Rp 21,38 miliar, SG$1,67 juta, dan US$72,7 ribu. Suap diberikan oleh Abdul bersama-sama dengan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. **(KTS)**

SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Senin, 25 April 2016 06:00

Besok Orno-Noach Dilantik, Tiakur Lumpuh

AMBON - Pemerintah Provinsi Maluku, memastikan pelantikan Barnabas Orno-Benjamin Noach sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Selasa (26/4). Sementara itu, pelayanan publik di Tiakur ibukota MBD, saat ini lumpuh total karena hampir semua pejabat di daerah itu berangkat menghadiri pelantikan.

Proses pelantikan digelar di lantai VII Kantor Gubernur Maluku. Gubernur Maluku, Said Assagaff melantik Orno-Noach mewakili Menteri Dalam Negeri. Proses pelantikan telah disiapkan.

Pelaksana tugas Karo Pemerintahan Setda Maluku, Jasmono mengatakan, pelantikan akan dilaksanakan Selasa besok. “Jadi proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati MBD terpilih akan dilakukan 26 April 2016,’’ kata Jasmono melalui pesan pendek kepada Kabar Timur, kemarin.

Dia mengaku, pihaknya jauh-jauh hari telah menyiapkan proses pelantikan. Ini dilakukan, lanjut dia, untuk memperlancar proses pelantikan. ‘’Pemerintah provinsi sudah melaksanakan persiapan-persiapan secara teknis termasuk rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan Pemda MBD. Untuk kelancaran pelaksanaan pelantikan akan dilaksanakan gladi besok (hari ini),’’ urai dia.

Sementara itu, sejumlah masyarakat MBD mengeluhkan pelayanan publik di daerah itu. Pasalnya, saat ini hampir seluruh pejabat dan PNS di Kota Tiakur ibukota MBD saat ini tengah berada di Kota Ambon.

“Kota Tiakur saat ini lumpuh total. Hampir seluruh pejabat dan pegawai berangkat ke Ambon menghadiri pelantikan. Sejumlah masyarakat mengeluh karena pelayanan kepada publik terganggu atau dihentikan,’’kata salah satu warga MBD, ketika menghubungi Kabar Timur, kemarin.

Warga MBD yang enggan namanya diwartakan mengaku, para pejabat dan PNS yang menghadiri pelantikan hampir semuanya menjadi tim pemenangan saat Pilkada MBD, Desember 2016 lalu. “Mereka berbondong-bondong menghadiri pelantikan. Jadi ada yang cari muka ada juga cari jabatan,’’terangnya.

Sementara itu, salah satu praktisi hukum asal MBD, Fredi Ulemlem berharap, putusan majelis hakim PTUN 26 April 2016 yang bertepatan dengan pelantikan Orno-Noach, sesuai fakta hukum yang diajukan kuasa hukum pasangan Moshe Maahury-Kim Markus.

“Jangan sampai majelis hakim terpengaruh dengan godaan lalu putuskan perkara itu tidak sesuai fakta hukum. Kenapa demikian, saya dapat pesan pendek kalau ada upaya majelis hakim disuap. Hal ini karena dalam pesan pendek itu menyebutkan kalau gugatan pasangan MAMA akan ditolak dan pelantikan Orno-Noach sah,’’kata Ulemlem ketika menghubungi Kabar Timur

Tak hanya itu, dalam isi pesan pendek itu juga mengaku, kalau gugatan di PTUN Jakarta untuk menggugat Mendagri dan Gubernur, majelis hakim yang menangani perkara itu juga akan dibayar. “Kita akan cari majelis hakim dan kita akan bayar. Jaman sekarang uang yang berbicara,’’sebut Ulemlem menirukan isi pesan pendek.

Karenanya, dia mengingatkan majelis hakim yang memutuskan perkara di PTUN, memutuskan sesuai fakta hukum. “Kalau tidak kami akan melaporkan majelis hakim yang menangani perkara itu di Komisi Judisial. Ini karena majelis hakim memutuskan tidak sesuai fakta hukum,’’pungkasnya.

Sekedar tahu, Orno-Noach dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati MBD, karena meraih suara terbanyak dari pasangan Moshe Maahury-Kim Markus dan Niko Kilikily-Jhon Frans saat Pilkada MBD 9 Desember 2015 lalu. **(KTM)**